

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari hampir seluruh negara di dunia. Banyak negara berusaha memberikan kontribusi dalam menangani masalah ini melalui berbagai kebijakan domestik yang dirancang untuk memperbaiki dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara ini, selain berlandaskan kepentingan global untuk mengurangi perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing. Seperti yang diketahui, setiap negara memiliki konsep kepentingan nasional yang menjadi panduan utama dalam menyusun kebijakan-kebijakannya. Kepentingan nasional, yang meliputi politik, keamanan, ekonomi, dan budaya, selalu menjadi dasar kebijakan negara, baik dalam urusan domestik maupun hubungan internasional (Liu, 2014).

Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya alam melimpah, juga telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan kepentingan nasionalnya dengan kontribusi global dalam menangani masalah lingkungan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah menempatkan industri otomotif, terutama kendaraan listrik (EV), sebagai salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi. Langkah ini tidak hanya diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di

panggung global. Kebijakan ini telah memperlihatkan hasil yang signifikan, dengan Jokowi memperoleh gelar “Bapak Otomotif Indonesia” sebagai bentuk apresiasi atas dukungannya terhadap sektor otomotif dalam negeri (Putri, 2023).

Langkah Jokowi untuk memberikan perhatian khusus terhadap industri otomotif, khususnya kendaraan listrik, sejalan dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam hal sumber daya nikel. Nikel adalah bagian penting dari baterai kendaraan listrik. Kedua negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia adalah Indonesia dan Australia (Statista Research Department, 2023). Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan kendaraan listrik di seluruh dunia. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta metrik ton, menjadikan Indonesia produsen nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel Australia sebesar 19 juta metrik ton mengungguli Indonesia (Arkyasa, 2023). Cadangan nikel Indonesia yang tersebar di Sulawesi dan Maluku Utara memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri.

Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan tambang besar seperti Aneka Tambang dan Vale telah berperan penting dalam pengelolaan dan eksploitasi cadangan nikel di Indonesia. Aktivitas eksplorasi dan pengembangan ini tidak hanya meningkatkan potensi ekonomi nasional tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di sektor kendaraan listrik global (NS Energy, 2021). Mengingat pentingnya nikel dalam produksi baterai, terutama baterai lithium-ion yang digunakan dalam kendaraan listrik, Indonesia berada di

posisi strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara harus menguasai sumber daya alam dan menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan Jokowi untuk memaksimalkan potensi nikel dalam pengembangan industri otomotif, khususnya kendaraan listrik, merupakan langkah yang tepat. Dengan memanfaatkan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia dapat menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon.

Peran nikel dalam industri kendaraan listrik sangat krusial, terutama dalam pembuatan baterai. Baterai nikel memiliki kepadatan energi yang hampir dua kali lipat dibandingkan bahan lainnya. Hal ini menjadikan nikel sebagai bahan baku penting untuk meningkatkan efisiensi kendaraan listrik, mengurangi berat kendaraan, dan memberikan ruang lebih besar untuk penumpang maupun kargo (Nickel Institute, 2023). Oleh karena itu, Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengumuman rencana produksi massal kendaraan listrik mulai tahun 2024, dengan target produksi 600.000 unit kendaraan listrik pada tahun 2030 (Indonesia Business Post, 2023).

Dalam pidatonya di KTT APEC 2023, Jokowi juga mengundang negara-negara anggota APEC untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor hilir industri kendaraan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak

hanya berfokus pada produksi dalam negeri, tetapi juga berusaha menarik investasi asing untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Indonesia telah menandatangani lebih dari 12 perjanjian senilai lebih dari 15 miliar dolar AS untuk produksi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan perusahaan besar seperti Hyundai Motor, LG Group, dan Foxconn (Christina, 2023). Bahkan, Jokowi berupaya untuk meyakinkan Elon Musk, CEO Tesla Inc., agar bersedia memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.

Ambisi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik didorong oleh prospek pasar yang besar, baik di dalam maupun luar negeri, serta kontribusi yang signifikan terhadap isu lingkungan global, khususnya dalam hal perubahan iklim. Dengan akses yang mudah terhadap bahan mentah seperti nikel dan kemampuan industri yang terus berkembang, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara-negara lain, seperti Thailand dan India, yang juga berupaya menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan produksi kendaraan listrik ke dalam Master Plan Pembangunan Ekonomi ASEAN 2011-2025, menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mengembangkan industri ini (Ministry of Economic Affairs, 2011).

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mencakup rencana industrialisasi yang berfokus pada dua bidang utama: (1) produksi bahan dasar logam, kimia, dan pertanian; dan (2) pembuatan produk yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Salah satu contoh dari

kategori ini adalah kendaraan listrik, yang membuat sektor ini berperan penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia (Cyrill, 2023).

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik (EV) di kawasan Asia Tenggara, sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya nikel, yang merupakan komponen utama baterai EV, guna meningkatkan nilai tambah ekspor mineral sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Sebagai produsen nikel terbesar dunia, Indonesia memanfaatkan keunggulan ini untuk menarik investasi dalam produksi baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung transisi menuju energi bersih yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060 dan komitmen dalam Perjanjian Paris (VOA, 2022). Kendaraan listrik dianggap sebagai solusi penting untuk menekan emisi karbon dari sektor transportasi, yang selama ini menjadi penyumbang utama polusi udara dan perubahan iklim. Meski demikian, tantangan besar juga dihadapi, seperti dampak lingkungan akibat ekstraksi nikel yang berpotensi merusak ekosistem lokal, sehingga pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, kebijakan luar negeri era Jokowi memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan industri otomotif ramah lingkungan. Diversifikasi pasar ekspor melalui diplomasi ekonomi yang kuat menjadi prioritas strategis untuk memperluas akses produk EV Indonesia ke pasar global. Selain itu, kerja sama internasional dengan negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan

Uni Eropa, diperlukan untuk transfer teknologi dan penguatan kapasitas riset domestik. Harmonisasi standar internasional, mulai dari baterai hingga emisi dan keamanan, menjadi langkah penting agar produk EV Indonesia kompetitif di pasar global. Namun, transisi ini juga harus memperhatikan pengurangan emisi karbon yang selama ini didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil. Data dari Kementerian ESDM (2019) menunjukkan bahwa bahan bakar fosil masih mendominasi pembangkitan listrik di Indonesia dengan kontribusi sebesar 81% terhadap total produksi listrik nasional. Dalam satu dekade terakhir, dominasi batu bara telah memicu lonjakan emisi karbon dioksida hingga mencapai tambahan 86 juta ton CO₂ (MtCO₂) antara tahun 2013-2023. Polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor juga telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di perkotaan, dengan kendaraan bermotor menyumbang sekitar 60-70% dari total polusi udara (Rosyidah, 2018). Oleh karena itu, akselerasi menuju energi terbarukan, penguatan infrastruktur kendaraan listrik, serta penerapan teknologi hijau yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi bersih dan solusi terhadap krisis iklim global (Climate Transparency, 2021).

Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk mendorong pengolahan nikel menjadi produk hilir yang memiliki nilai tambah, seperti baja tahan karat dan baterai lithium, sehingga mereka memberlakukan kebijakan untuk membatasi ekspor bijih nikel mentah (Habir, 2023). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah sumber daya nikel Indonesia dieksploitasi oleh pihak asing, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kebijakan ini, Indonesia berusaha untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya alamnya dan memperkuat posisinya sebagai produsen utama bahan baku penting untuk kendaraan listrik di seluruh dunia.

Meski demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam perjalanannya menuju status sebagai pemain utama di industri kendaraan listrik global. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya ketergantungan pada impor kendaraan serta kurangnya infrastruktur pendukung untuk kendaraan listrik. Pada tahun 2022, tercatat bahwa Indonesia mengimpor lebih dari 83.298 unit kendaraan, dengan peningkatan 74,3% dibandingkan tahun sebelumnya (Nugraha, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan pada impor, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal penyediaan kendaraan listrik yang terjangkau dan berkualitas di pasar domestik.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, yang ditujukan untuk menarik minat investor asing dalam mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pada acara Indonesia International Auto Show 2018, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif lebih besar bagi industri yang berorientasi pada ekspor, dengan harapan industri tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan berfokus pada peningkatan daya saing produk dalam negeri (Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia, 2018).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana peran kebijakan luar negeri Jokowi dalam mendukung pengembangan industri otomotif yang ramah lingkungan di Indonesia?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan terkait berdasarkan penelitian dan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya nikel dan pengembangan industri kendaraan listrik. Pertama, penelitian ini melihat kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik. Ini termasuk melihat berbagai insentif untuk investor, program kerja sama dengan perusahaan mobil internasional, dan regulasi yang dibuat untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Kedua, fokus utama penelitian ini adalah menilai potensi cadangan nikel Indonesia dan perannya dalam produksi kendaraan listrik global. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pemanfaatan nikel yang berkelanjutan dapat meningkatkan posisi Indonesia di pasar kendaraan listrik internasional dan memperkuat daya saing industri otomotif dalam negeri. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi Indonesia saat mengembangkan industri EV. Ketergantungan pada impor, infrastruktur yang kurang, dan resistensi pasar adalah beberapa dari masalah tersebut. Namun demikian, penelitian ini akan

memeriksa peluang yang tersedia bagi Indonesia dalam hal investasi asing dan pertumbuhan pasar domestik yang terus meningkat. Jadi, penelitian ini memberikan saran kebijakan untuk membantu industri EV berkembang dengan cara yang berkelanjutan. Rekomendasi tersebut akan mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan industri kendaraan listrik. Dengan mengintegrasikan semua tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di sektor kendaraan listrik Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih informasional dalam kebijakan publik dan mendukung posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri otomotif global yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan yang ramah lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan banyak keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, termasuk yang berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang signifikan bagi studi Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam konteks Teori Hijau.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Teori Hijau dapat diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam pengembangan industri otomotif yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengkaji keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan inisiatif industri otomotif, penelitian ini akan membantu memperjelas bagaimana pendekatan yang berkelanjutan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan lingkungan global.

Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dengan keberlanjutan, perubahan iklim, dan pengembangan industri yang bertanggung jawab. Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dan memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk studi selanjutnya di bidang yang serupa dengan menganalisis secara menyeluruh hubungan antara kebijakan internasional dan industri otomotif.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan sarana yang sangat berharga bagi penulis dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari. Proses penelitian tidak hanya memperdalam pemahaman penulis tentang teori yang relevan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir analitis penulis dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan tema yang tengah dibahas. Dengan proses ini, penulis akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia akademis

dan profesional yang memerlukan pemikiran kritis serta kemampuan untuk menyusun argumen yang logis.

1.4.2.2. Bagi Universitas dan Khalayak Umum

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi dasar dan/atau referensi untuk penelitian yang lebih luas dengan fokus dan lingkup yang lebih besar. Penelitian ini akan membantu memperluas pandangan akademisi dan praktisi dengan memberikan garis besar yang jelas tentang bagaimana teori hijau dapat diterapkan dalam industri otomotif dan kebijakan internasional. Penulis juga berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada proses pengembangan riset di universitas serta kajian akademis lainnya, sehingga mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam upaya mencapai keberlanjutan dan inovasi dalam industri yang berhubungan dengan isu lingkungan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian akademis telah mengeksplorasi kebijakan internasional Indonesia yang berkaitan dengan pengembangan industri otomotif, khususnya dalam konteks hilirisasi industri dan pengelolaan nikel. Namun, analisis yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik (EV) masih terbatas. Salah satu literatur utama adalah karya Arif Deddy, Agus Adriyanto, dan R. Djoko Andreas berjudul "Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor

Bijih Nikel terhadap Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara". Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyoroti dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap ekonomi nasional, termasuk potensi peningkatan pengangguran dan penurunan cadangan devisa (Deddy, Adriyanto, & Andreas, 2023). Kelebihan studi ini adalah pendekatan empirisnya yang mendalam terkait dampak kebijakan domestik terhadap perekonomian. Namun, penelitian ini kurang mengelaborasi bagaimana kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor hilir secara berkelanjutan dan bagaimana keterkaitannya dengan kebijakan internasional.

Literatur lain yang relevan adalah karya Fandy Kusuma Faizal dan Ilyas Sibali berjudul "Pesona Nikel Indonesia Kurang Memikat Tesla". Penelitian ini menyoroti tantangan utama dalam menarik investasi asing di sektor kendaraan listrik, meskipun Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Faizal dan Sibali mencatat bahwa infrastruktur yang kurang memadai dan ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama bagi perusahaan besar, seperti Tesla, untuk berinvestasi di Indonesia (Faizal & Sibali, 2023). Studi ini memberikan perspektif penting tentang hambatan struktural yang dihadapi Indonesia, tetapi kurang mengaitkan temuan tersebut dengan strategi kebijakan luar negeri atau diplomasi ekonomi hijau yang dapat mendukung transformasi industri otomotif. Sebaliknya, tulisan Sunarti (2022) hanya focus menyoroti peran hukum Uni Eropa dalam menerapkan ekonomi hijau melalui regulasi dan directive yang konsisten. Beberapa di antaranya adalah Regulation (EU) 2018/1999 tentang tata kelola energi dan Directive 2003/87/EC tentang perdagangan emisi gas rumah kaca. Prinsip hukum

seperti precaution, prevention, dan the 'polluter pays' menjadi dasar kebijakan, memastikan pihak pencemar bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Uni Eropa juga aktif di panggung internasional dengan inisiatif seperti Environment Action Programmes (EAPs), termasuk EAP ke-7 yang berfokus pada perlindungan alam, pertumbuhan rendah karbon, dan mitigasi ancaman lingkungan. Dalam konteks ekonomi hijau, Uni Eropa mengadopsi nilai internasional, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon, sebagaimana dirumuskan oleh UNEP. Hukum Uni Eropa menjadi kerangka strategis untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, menyesuaikan kebijakan dengan tantangan global serta kebutuhan anggotanya.

Kemudian Yusran dan Nelly (2023) ini menganalisis permasalahan illegal fishing di Indonesia melalui perspektif Green Politics Theory (GPT). Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, tulisan ini menekankan pentingnya cara pandang ekosentris yang menjadikan kelestarian ekologi sebagai prioritas utama. Dalam menyelesaikan krisis lingkungan laut akibat illegal fishing, pemerintah Indonesia disarankan untuk melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah mengadopsi GPT dalam politik dan konstitusi mereka.

Literatur terdahulu memberikan wawasan tentang hambatan domestik dan kajian dari berbagai disiplin ilmu dan menggunakan teori hijau tetapi belum mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut dan mendorong kerjasama internasional dalam mendukung transisi ke industri kendaraan listrik yang berkelanjutan. Selain itu, meskipun ada fokus pada hilirisasi dan potensi cadangan nikel, literatur yang

membahas integrasi kebijakan hijau global, seperti diplomasi ekonomi hijau dan penerapan Green Theory, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kebijakan luar negeri Presiden Jokowi melalui pendekatan Teori Hijau dalam konteks pengembangan industri EV di Indonesia.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Hijau (Green Theory)

Penulis menggunakan Teori Hijau, juga dikenal sebagai Green Theory, sebagai kerangka analisis untuk menganalisis masalah ini. Teori ini akan berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan analisis kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo, yang berfokus pada transformasi industri mobil Indonesia menjadi industri yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Teori hijau tidak muncul secara kebetulan. Sebaliknya, itu adalah tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi dalam konteks global yang semakin kompleks, yang membutuhkan pendekatan baru. Teori ini juga membedakan dirinya dari teori-teori Hubungan Internasional (HI) tradisional yang cenderung tidak mampu menjelaskan permasalahan kontemporer dengan memadai.

Teori Hijau muncul sebagai hasil dari perkembangan kesadaran global mengenai isu-isu lingkungan. Isu lingkungan mulai menempati agenda utama dalam politik internasional, terutama setelah Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972. Pertemuan ini menjadi titik awal bagi negara-negara untuk memperhatikan isu polusi dan perubahan iklim. Sejak saat itu, terutama pada tahun 1990-an, perhatian terhadap isu lingkungan semakin

meningkat dan menjadi bagian integral dari agenda internasional, mencakup berbagai forum seperti Konferensi Rio dan Protokol Kyoto.

Teori Hijau secara fundamental memiliki dua perspektif utama: ekosentris dan antroposentris. Perspektif ekosentris menempatkan alam di atas kepentingan manusia dan menekankan pentingnya aksi kolektif untuk memperbaiki lingkungan (Dyer, 2018). Dalam pandangan ini, tindakan manusia harus berfokus pada kelestarian lingkungan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan individu atau kelompok. Sebaliknya, perspektif antroposentris menempatkan manusia sebagai pusat segala hal, melihat lingkungan hanya sebagai wadah hidup yang bersifat sementara. Dalam konteks ini, manusia menjadi fokus utama, dan lingkungan dianggap tidak lebih dari sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Namun, Teori Hijau menolak pandangan antroposentris ini dan berargumen bahwa kerusakan lingkungan saat ini disebabkan oleh dominasi perspektif yang mengutamakan kepentingan manusia, mengabaikan keseimbangan ekosistem.

Menurut Hugh Dyer, Teori Hijau menganggap bahwa perubahan lingkungan adalah hasil dari pilihan kolektif yang diambil oleh manusia (Dyer, 2018). Dalam hal ini, perubahan lingkungan yang negatif terjadi sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dan aksi kolektif untuk menjaga keberlanjutan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Teori Hijau adalah inovasi politik dan perubahan perilaku manusia dalam politik global. Dalam konteks ini, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional memiliki tanggung jawab besar untuk menginisiasi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam Teori Hijau adalah interaksi antara negara dalam membangun kerjasama internasional untuk redistribusi sumber daya. Konsep Green State atau Negara Hijau menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam negosiasi dan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Negara dianggap memiliki otoritas yang diperlukan untuk menjalin kerjasama dalam mengatasi isu-isu lingkungan yang bersifat global. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur domestik, tetapi juga sebagai aktor dalam masyarakat internasional yang harus bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan (Tayyar, 2019).

Selanjutnya, dalam konteks ekonomi, konsep Ekonomi Hijau menyoroti hubungan antara isu lingkungan dan ekonomi internasional. Sejak lima dekade terakhir, permasalahan lingkungan seperti degradasi dan polusi telah menunjukkan dampak yang signifikan tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga transnasional dan global. Kaum ekonomi hijau berpendapat bahwa perdagangan yang tidak terkendali dapat menjadi penyebab utama permasalahan lingkungan, karena pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan konsumsi sumber daya alam sangat dibutuhkan (Tayyar, 2019).

Mengacu pada ketiga konsep utama dalam Teori Hijau tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan alam di atas kepentingan manusia akan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Teori Hijau. Dengan kata lain, sebuah negara yang merumuskan kebijakan luar negerinya dengan tujuan memperbaiki kondisi alam dan lingkungan akan mencerminkan

pemikiran para penganut Teori Hijau. Dalam kebijakan internasional Presiden Jokowi, terlihat upaya nyata untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik (EV) agar industri mobil Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama di pasar internasional, tetapi juga berkontribusi besar pada industri mobil yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan ide-ide yang terkandung dalam teori hubungan internasional hijau.

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan strategis untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memilih untuk berkonsentrasi pada kendaraan listrik. Ini dilihat dari sudut pandang teori hijau sebagai upaya untuk meningkatkan persaingan di industri mobil Indonesia dan berkontribusi pada tujuan perubahan iklim global. Produksi kendaraan listrik akan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di dalam negeri dan membuka pintu ke pasar global yang semakin memperhatikan masalah keberlanjutan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kebijakan luar negeri Jokowi yang berfokus pada pengembangan industri kendaraan listrik dan pemanfaatan sumber daya nikel menjadi langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Hijau. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi dalam upaya global untuk menjaga kesehatan planet kita.

Sebagai kesimpulan, Teori Hijau menawarkan perspektif yang berguna untuk menilai kebijakan luar negeri Indonesia Presiden Jokowi saat ini. Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dengan fokus pada pengembangan industri kendaraan ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri mobil global yang berkelanjutan melalui inovasi, kerjasama internasional, dan pemanfaatan sumber daya yang bijak. Untuk mengatasi masalah saat ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

1.7. Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang menitikberatkan pada produksi kendaraan listrik (EV) di dalam negeri memberikan kontribusi signifikan dalam menjadikan industri otomotif Indonesia sebagai industri yang ramah lingkungan. Hipotesis ini berakar pada pemahaman bahwa upaya pemerintah untuk mendorong produksi EV tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri otomotif, tetapi juga dengan tujuan yang lebih besar dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Meskipun, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah.

1.8. Metodologi Penelitian

Penulis memilih metode penelitian kualitatif untuk menyelesaikan penelitian ini karena kemampuannya untuk mempelajari kondisi objek yang bersifat alamiah. Peran yang dimainkan oleh peneliti dalam konteks ini sangatlah penting, sehingga mereka dapat dianggap sebagai alat utama dalam proses penelitian.

Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses yang rumit yang melibatkan analisis kata-kata dan laporan yang rinci dari sudut pandang narasumber. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada perspektif informan dan menggunakan manusia sebagai subjek utama. Menurut Creswell (2014), ada lima pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif: fenomenologi, etnografi, studi kasus, naratif, dan *grounded theory*.

Penulis penelitian ini memilih pendekatan studi kasus karena pendekatan ini tidak mengukur tingkat perubahan dalam penelitian kuantitatif, tetapi lebih berfokus pada penggunaan kata-kata sesuai dengan sifat penelitian kualitatif. Creswell (2014) menyatakan bahwa studi kasus adalah desain penelitian yang dapat digunakan di berbagai bidang, terutama dalam penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kasus secara menyeluruh, yang sering digunakan untuk mengevaluasi program, kegiatan, aktivitas, proses, individu, dan kelompok individu. Jenis penelitian ini dapat berupa penelitian tunggal atau yang dibatasi oleh waktu dan lokasi penelitian.

Pengumpulan data dalam pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sesuai dengan periode waktu yang relevan untuk penelitian (Creswell, 2014). Hal ini memungkinkan peneliti untuk membedakan pola penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan pola penelitian lainnya. Dalam penelitian kualitatif, data utama yang digunakan bersumber dari kata-kata serta perilaku manusia, sementara data tambahan dapat bersumber dari dokumen dan studi pustaka lainnya (Moleong, 2005). Kedua jenis data digunakan oleh penulis: data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis sendiri, seperti melalui pengamatan dan wawancara; jenis lain dari data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dari studi pustaka, yang mencakup berita, dokumen, dan buku (Sugiyono, 2016).

Setelah melalui tahapan menganalisis data kualitatif, penulis menggunakan metode *process-tracing* sebagai teknik analisis data penelitian. *Process-tracing* bertujuan untuk memahami ketidakpastian terkait terjadinya suatu fenomena dengan mengeksplorasi hubungan sebab akibat yang berasal dari rekam bukti kasus tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan berbagai kemungkinan penjelasan dari fenomena yang diteliti, melangkah dari satu tahap ke tahap lainnya (Bennett, 2015). Dengan pendekatan ini, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika

kebijakan luar negeri Indonesia dan dampaknya terhadap industri otomotif, khususnya dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan studi kasus, penulis berusaha untuk menggali lebih dalam perspektif para narasumber dan menyajikan hasil yang relevan serta bermanfaat bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang berarti penulis akan memberikan definisi dan deskripsi tentang topik yang diteliti tanpa melakukan analisis mendalam. Metode deskriptif berfokus pada masalah yang sedang terjadi saat ini. Tujuan dari pendekatan penelitian ini sendiri adalah untuk menjelaskan semua peristiwa yang terjadi selama penelitian sebagaimana mestinya. Selama proses penelitian ini, penulis telah mengumpulkan bukti yang akan mendukung penjelasan tentang masalah tersebut.

1.8.2. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo dalam mendukung perkembangan industri otomotif ramah lingkungan selama periode 2020 hingga Oktober 2024. Jangkauan penelitian mencakup diplomasi ekonomi, strategi negosiasi, dan kemitraan internasional untuk mempercepat transfer

teknologi, menarik investasi asing, serta meningkatkan akses pasar kendaraan listrik. Penelitian juga menyoroti kerja sama dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, serta peran Indonesia di forum internasional seperti G20, ASEAN, dan COP. Fokusnya adalah memahami bagaimana kebijakan luar negeri mendukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan melalui kerja sama teknis, pengembangan kapasitas, dan diplomasi terkait energi bersih

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen resmi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data primer diperoleh dari studi kepustakaan dengan sumber referensi (Silalahi, 2012). Penelitian ini juga akan didukung dengan data-data hasil korespondensi dengan ahli ataupun pihak yang terkait dengan tema penelitian ini.

1.8.4. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang saling terkait, masing-masing berfokus pada aspek-aspek penting dalam pengembangan industri otomotif Indonesia, khususnya dalam konteks produksi kendaraan listrik (EV) dan kebijakan luar negeri yang mendukungnya. Bab I atau bab pendahuluan menjelaskan dasar dan latar belakang penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, serta relevansi studi ini dalam

konteks kebijakan luar negeri Indonesia dan dampaknya terhadap industri otomotif. Selain itu, bab ini akan membahas pentingnya keberlanjutan lingkungan dan bagaimana kebijakan pemerintah terkait produksi kendaraan listrik sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bab II berisi pembahasan mengenai perkembangan industri otomotif Indonesia. Di dalamnya, penulis akan menjelaskan sejarah dan evolusi industri otomotif di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang ada. Pembahasan ini akan mencakup seberapa signifikan pengaruh kebijakan produksi mobil listrik terhadap perekonomian Indonesia, termasuk analisis terhadap dampak kebijakan tersebut dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bab ini membahas upaya Indonesia untuk menjadikan industri mobil lebih ramah lingkungan, termasuk upaya untuk mengurangi emisi karbon dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik.

Bab III berfokus pada kepentingan nasional dan dinamika regional dalam konteks ASEAN dan G20. Penulis menganalisis bagaimana kepentingan nasional Indonesia terkait dengan produksi kendaraan listrik dipengaruhi oleh kerjasama regional dan global. Di dalam bab ini, perhatian diberikan pada peran ASEAN dan G20 dalam mendukung transisi industri otomotif menuju keberlanjutan. Selain itu, penulis juga mengeksplorasi daya beli masyarakat Indonesia dalam industri otomotif, termasuk faktor yang mempengaruhi konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.

Bab IV, atau bab penutup. Selain mengaitkan temuan dengan hipotesis awal, bab ini memberikan rangkuman tentang temuan utama dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik yang lebih berkelanjutan dan efisien di Indonesia. Selain itu, penulis akan menekankan betapa pentingnya kerja sama antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan kebijakan ini. Diharapkan bahwa penelitian ini, melalui pembagian yang sistematis ini, akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang ada dalam pertumbuhan industri mobil di Indonesia. Ini juga akan membahas bagaimana kebijakan di negara lain dapat berkontribusi pada pembentukan industri mobil yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

